

Keprihatinan dan Harapan Gereja-Gereja Indonesia kepada Capres dan Cawapres

Jayapura, 24 Agustus 2004. Bertempat di Hotel Sentani Indah, Papua, para pemimpin Gereja Indonesia mengadakan dialog dengan Capres dan Cawapres 2004-2009. Presiden Megawati dan Yusuf Kalla memenuhi undangan para pemimpin gereja tersebut dan bersedia mengadakan dialog. Dalam kesempatan itu para pemimpin Gereja –yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia—menyerahkan pernyataan “Keprihatinan dan Harapan Pemimpin Gereja Se-Indonesia kepada Calon Presiden/ Wakil Presiden Indonesia 2004/2009”. Dalam pernyataan yang ditandatangani 15 pemimpin gereja Kristen dan Katolik ini, Capres dan cawapres diminta agar memperhatikan tiga pokok masalah, yakni (1) hukum, HAM, dan kerukunan agama, (2) politik dan pemerintahan, serta (3) pembangunan wilayah – studi kasus Papua.

Dalam bagian pertama, Gereja-gereja menegaskan penolakan mereka terhadap pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Selain itu, mereka juga meminta penegakan hukum secara konsekuen, penegakan supremasi sipil dan kesungguhan Polri dalam upaya *law enforcement*. Sehubungan dengan pokok yang kedua, para pemimpin gereja ini mengungkapkan keinginan agar prinsip demokrasi dijadikan landasan dalam pengelolaan negara, penempatan posisi jabatan berdasarkan kompetensi, prinsip pemerataan dalam pembangunan, dan pemberdayaan perempuan.

Pada 24 Agustus 2004 malam, Yusuf Kalla mendapat giliran pertama untuk bertatap muka dengan para pemimpin agama dan Bpk. Hardus Desa sebagai Ketua Steering Committee membacakan pernyataan di hadapan cawapres yang berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono ini. Cawapres menanggapi pernyataan secara positif dan simpatik dengan mengatakan bahwa keprihatinan dan harapan para pemimpin gereja ini merupakan keprihatinannya juga dan justru mendorongnya untuk maju dalam usaha memimpin bangsa ini.

Hari berikutnya disediakan untuk Presiden Megawati yang mengadakan dialog pada 25 Agustus 2004 pagi. Kembali Ketua Steering Committee membacakan pernyataan yang sudah dipersingkat karena permintaan protokol kepresidenan meski pernyataan lengkap tetap diserahkan. Dalam tanggapannya, Presiden menegaskan bahwa pihaknya mewarisi keadaan negara dan pemerintahan yang morat marit sehingga tanggung jawab tidak bisa dibebankan begitu saja kepadanya. Ketua Steering Committee berkomentar, “Mega kelihatan salah menempatkan diri karena dia menempatkan diri dalam posisi presiden sehingga bahan yang kami sampaikan dianggap sebagai kritik. Akibatnya reaksi yang ditampilkan bersifat defensif”. Hal senada dikemukakan oleh Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar OFM.